

**PENGARUH KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAN
PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH PADA ORGANISASI PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan
memenuhi syarat-syarat guna
memperoleh gelar sarjana**

Oleh

**DANNY PRATAMA NASUTION
NPM : 20100089
PRODI AKUNTANSI**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SABANG (STIES)
BANDA ACEH
2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menjalankan tugas dan aktivitas sehari-hari dalam mengikuti perkuliahan sampai dengan penyelesaian penyusunan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebahagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang Banda Aceh.

Penulis menyadari sepenuhnya sebagai manusia yang lemah dan tidak luput dari kesalahan serta kekhilafan khususnya dalam penulisan skripsi ini yang mungkin disana-sini masih terdapat kekurangan dan kesalahan, maka pada tempatnya Penulis mengharapkan masukan ataupun kritikan yang membangun dari para ilmuwan dan atau pihak lainnya atas skripsi ini.

Semoga skripsi ini bermanfaat untuk pengembangan wawasan dan ilmu pengetahuan ilmu Akuntansi khusus tentang Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan dan penerapan SAP terhadap akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada waktu yang akan datang.

Akhir kata Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Banta Karollah SE,M.S. M selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang (STIES) Banda Aceh, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesikan studi di STIES Banda Aceh.
2. Ibu Intan Novia Astuti, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang (STIES) Banda Aceh

3. Dra. Nurhayati, M.Si, Ak, CA selaku Pembimbing Pertama yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta saran kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Intan Novia Astuti, SE, M.Si selaku Pembimbing Kedua yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan serta saran kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Bapak/Ibu dosen STIES Banda Aceh, yang tanpa pamrih dan sepenuh hati telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada kami selama mengikuti perkuliahan dan bimbingan skripsi ini.
6. Kedua orang Tua yang sangat dicintai yang selama ini telah memberikan dukungan, bantuan baik moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Disamping itu, juga kepada keluarga saya yang tercinta yang penuh kesabaran telah memberikan dukungan dan perhatian yang cukup besar dalam penyelesaian perkuliahan di STIES Banda Aceh.
7. Semua teman-teman tercinta yang secara aktif telah memberikan dukungan dan bantuan sehari-hari selama perkuliahan dan bimbingan skripsi di Kampus STIES Banda Aceh. Atas bantuan yang telah diberikan, semoga ALLAH S.W.T melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua, *Amiin ya rabbal A'lamin.*

Banda Aceh, Desember 2021

Penulis

DANNY PRATAMA NASUTION

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	vi
PERNYATAAN	vi
ABSTRAK.....	vii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang dan Permasalahan	1
1.2 Masalah Penelitian	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Manfaat Teoritis	7
1.4.2 Manfaat Praktis	7
1.5 Skop Penelitian	7
 BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	8
2.1.1 Pengertian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	8
2.1.2 Tujuan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	9
2.1.3 Indikator Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	11
2.2 Kualitas Laporan Keuangan.....	12
2.2.1 Pengertian Kualitas Laporan Keuangan.....	12
2.2.2 Faktor-Faktor Dalam Kualitas Laporan Keuangan	14
2.2.3 Indikator Kualitas Laporan Keuangan	15
2.3 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah.....	15
2.3.1 Pengertian Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah	15
2.3.2 Manfaat Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah	17
2.3.3 Indikator Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah.....	19
2.4 Penelitian Terdahulu	20
2.5 Kerangka Konseptual	22
2.5.1 Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	22
2.5.1 Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	23
2.6 Hipotesis Penelitian	24

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Populasi dan Sampel Penelitian	26
3.2 Metode Penarikan Sampel	29
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	29
3.4 Operasional Variabel	31
3.5 Metode Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil penelitian	40
4.1.1 Analisis Data Hasil Penelitian	40
4.1.2 Karakteristik Responden	40
4.2 Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas.....	42
4.2.1 Pengujian Validitas	42
4.2.2 Pengujian Reliabilitas	44
4.3 Analisis Deskriptif	44
4.3.1 Persepsi Responden terhadap Kualitas Laporan Keuangan (X1)	45
4.3.2 Persepsi Responden terhadap Penerapan SAP (X2)	47
4.3.3 Persepsi Responden terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y).....	48
4.4 Hasil Pengujian Asumsi Klasik	50
4.4.1 Hasil Pengujian Normalitas	50
4.4.2 Hasil Pengujian Multikoliniearitas	51
4.4.3 Hasil Pengujian Heteroskedastisitas	51
4.5 Hasil Uji Hipotesis	52
4.5.1 Hasil Pengujian Secara Simultan	52
4.5.2 Hasil Pengujian Secara Parsial.....	53
4.6 Koefisien Korelasi dan Determinasi	55
4.7 Pembahasan.....	55
4.7.1 Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	55
4.7.2 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	57
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	59
5.2 Saran	60
DAFTAR PERPUSTAKAAN.....	61
DAFTAR LAMPIRAN	65

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Penelitian Terdahulu	21
Tabel III.1	Daftar Populasi	27
Tabel III.2	Skala Likert.....	31
Tabel III.3	Operasional Variabel	33
Tabel IV.1	Karakteristik Responden.....	41
Tabel IV.2	Hasil Uji Validitas	43
Tabel IV.3	Hasil Uji Reliabilitas.....	44
Tabel IV.4	Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Terhadap Pernyataan yang Berhubungan dengan Kualitas Laporan Keuangan (X1).....	46
Tabel IV.5	Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Terhadap Pernyataan yang Berhubungan dengan Penerapan SAP(X2).....	47
Tabel IV.6	Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Terhadap Pernyataan yang Berhubungan dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)..	49
Tabel IV.7	Hasil Pengujian Multikolinearitas	51
Tabel IV.8	Hasil Uji F (Simultan).....	53
Tabel IV.9	Pengaruh Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen)	54
Tabel IV.10	Nilai Koefisien Determinasi	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Konseptual	19
Gambar IV 1 Normal Probability Plot.....	50
Ganbar IV.2 Grafik ScatterPlot	52

ABSTRAK

PENGARUH KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAN PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR

Oleh

**DANNY PRATAMA NASUTION
NPM : 20100089**

Pembimbing

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 1. Pembimbing I | Dra. Nurhayati, M.Si, Ak, CA |
| 2. Pembimbing II | Intan Novia Astuti, SE, M.Si |

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Kualitas laporan keuangan dan penerapan SAP terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara simultan maupun parsial.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Model analisis yang digunakan yaitu Analisis Regresi Linear Berganda. Sampel dalam penelitian ini adalah 58 orang yang merupakan pengawali yang ada pada Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten Aceh Besar. Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data Primer, dengan pengolahan data menggunakan software SPSS versi 25.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kualitas pengaruh Kualitas laporan keuangan dan penerapan SAP secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten Aceh Besar. Secara parsial Kualitas laporan keuangan dan penerapan SAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten Aceh Besar. Dilihat dari hasil koefisien determinasi sebesar 0,595 yang artinya variabel akuntansi kinerja instansi pemerintah dapat dijelaskan oleh kualitas laporan keuangan dan penerapan SAP sebesar 59,5% sedangkan 40,5% pengaruhnya dijelaskan oleh variabel lainnya

Kata Kunci : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kualitas Laporan Keuangan, Penerapan SAP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Dan Permasalahan

Otonomi daerah membawa konsekuensi logis berupa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan manajemen keuangan yang sehat. Melalui UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, dan aturan pelaksanaannya, khususnya PP Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah maka terhitung tahun anggaran 2001, telah terjadi pembaharuan di dalam manajemen keuangan daerah. Dengan adanya otonomi ini, daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat, (Reyhan:2017)

Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah. Namun demikian, dengan kewenangan yang luas tersebut, tidaklah berarti bahwa pemerintah daerah dapat menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimiliki sekehendaknya, tanpa arah dan tujuan yang jelas. Hak dan kewenangan yang luas yang diberikan kepada daerah, pada hakekatnya merupakan amanah yang harus dipertanggung jawabkan secara akuntabel dan transparan, baik kepada masyarakat di daerah maupun kepada Pemerintah Pusat yang telah membagikan dana perimbangan kepada seluruh daerah di Indonesia.

Terselenggaranya pemerintahan yang baik {good governance) merupakan kehendak kita bersama. Akuntabilitas diyakini mampu mengubah kondisi pemerintahan yang tidak dapat memberikan pelayanan public secara baik menuju suatu tatanan pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel akan mendapat dukungan dari publik. Ada kepercayaan masyarakat atas apa yang diselenggarakan, direncanakan, dan dilaksanakan oleh program yang berorientasi kepada publik. Di pihak penyelenggara, akuntabilitas mencerminkan komitmen pemerintah dalam melayani public Mardiasmo (2019:450)

Pemerintahan sebagai organisasi yang bergerak di bidang jasa pelayanan publik, dalam pengelolaannya harus melakukan transparansi dan akuntabilitas publik. Akuntabilitas public adalah kewajiban pihak pemegang amanah {agent) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (prinsipal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo; 2019:20).

Berdasarkan peraturan perundangan berupa Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab.

Laporan akuntabilitas instansi pemerintah merupakan alat untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan bertujuan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya. Tuntutan

masyarakat terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah semakin menguat, berkenaan dengan hal tersebut penciptaan akuntabilitas public harus dilaksanakan dalam sistem dan standar akuntansi pemerintahan untuk dapat menciptakan good governance.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No 17 tahun 2003 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah yang benar dan pemahaman yang baik terhadap akuntansi keuangan daerah oleh pengelola keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tentunya akan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Menurut PP No. 71 tahun 2010, terdapat hubungan terkait antara Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.

Kualitas pelaporan keuangan secara jelas dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang sekarang menjadi Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010, bahwa kualitas pelaporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki jika memenuhi unsur kualitatif laporan keuangan yaitu ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya,

antara lain pelaporan keuangan tersebut memenuhi unsure relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Laporan keuangan daerah dikatakan berkualitas apabila laporan keuangan yang disajikan setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan LKPD. Artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas.

Objek dalam penelitian ini adalah Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) kabupaten Aceh Besar. Baru-baru ini Menurut berita aceh besar, laporan keuangan pemerintahan aceh besar untuk tahun 2020, sudah mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) . Walapun LHP Aceh besar memperoleh prediket WTP tetapi banyak hal yang direkomendasi oleh BPK untuk melakukan langkah-langkah perbaikan antara lain ditujukan kepada BPKD, Dinas PUPR, DPMG, Dinas Kelautan, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Dinas Pertanian dan Direktur RSUD untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pendapatan daerah. Pemerintah Aceh Besar diharapkan dapat menindaklanjuti rekomendasi tersebut sehingga dapat mewujudkan kemakmuran masyarakat. Hal ini tentu saja harus di perbaiki oleh semua kepala dinas yang memang menjadi pekerjaan yang memang harus diselesaikan, tetapi dalam kenyataannya banyak temuan yang tidak bisa diselesaikan oleh kepala SKPD, sehingga akan menjadi temuan lagi untuk tahun berikutnya. <http://acehbesarkab.go.id/index.php/news/read/2020/06/29/>

Dilihat dari informasi yang dikeluarkan dengan banyaknya rekomendasi yang dikerluarkan oleh BPK, dapat artikan bahwa dinas yang berada di bawah naungan

pemerintahan Aceh besar masih belum melaksanakan kinerja secara optimal sehingga banyak target yang tidak tercapai dan harus memperbaiki kinerjanya, akibat ketidak tepatan sasaran anggaran yang diberikan serta pengelolaan dana pemerintah Aceh sehingga masyarakat aceh besar tidak dapat menikmatinya (Risdiana, 2018). Sebuah pelaksanaan pemerintahan yang bersih menuntut seluruh pemerintah daerah bekerja secara profesional. Tuntutan yang semakin tinggi diajukan terhadap pertanggungjawaban yang diberikan oleh penyelenggara negara atas kepercayaan yang diamanatkan kepada mereka. Dengan kata lain, yang membuat ketidak puasan masyarakat akan manfaat yang diperoleh dari pelayanan instansi pemerintah memicu timbulnya tuntutan yang tinggi terhadap pertanggungjawaban pemerintah. Pemerintah dituntut untuk dapat lebih transparan dan akuntabel dalam menjalankan administrasi pemerintahan khususnya yang berhubungan dengan anggaran (Dalimunthe, 2018).

Dari paparan diatas dapat dikatakan bahwa OPD Kabupaten Aceh Besar masih banyak permasalahan berkaitan dengan hasil akuntabilitas instansi pemerintah kabupaten Aceh besar banyak yang perlu dibenahi dalam rangka menwujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar sehingga visi dan misi dari pemerintahan daerah terpilih tercapai.

Berdasarkan rangkaian masalah tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Laporan Keuangan dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Organisasi Pemerintaha Daerah Kabupaten Aceh Besar”**.

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan paparan latar belakang masalah sebelumnya, maka dirumuskan pertanyaan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah kualitas laporan keuangan dan penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah pada Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Besar.
2. Apakah kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah pada Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Besar.
3. Apakah penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah pada Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Besar.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualitas laporan keuangan dan penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah pada Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Besar.
2. Untuk mengetahui kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah pada Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Besar.
3. Untuk mengetahui penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah pada Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Besar.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoretis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi pedoman dan referensi untuk penelitian selanjutnya. Selain itu dengan adanya penelitian ini, pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan dan penerapan SAP semakin luas.

1.4.2 Manfaat Praktis

Bagi OPD Kabupaten Aceh Besar diharapkan penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan mengenai kualitas laporan keuangan dan penerapan SAP terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar.

1.5 Skop Penelitian

Penelitian ini mengambil skop bidang ilmu akuntansi sector publik, dengan analisis menggunakan metode analisis kuantitatif. Dengan skop penelitian terfokus pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan, yang lebih menitik beratkan pada pengaruh kualitas laporan keuangan dan penerapan SAP terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang beralamat di Jln. Prof.A.Madjid Ibrahim, No 4 Kota Jantho, Aceh Besar.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Halim & Syam Kusufi. (2012). *Akuntansi Sektor Publik: teori, konsep dan aplikasi*. Salemba Empat : Jakarta.
- Adisasmita. (2014). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Andini. (2015). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan. *Jurnal Akuntansi*. Vol.IX.No.2. 119-123
- Anggraeni. (2015). Pengaruh Pengawasan Keuangan, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan, Dan Komitmen Manajemen Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada 15 Dinas Di SKPD Kabupaten Badung), BPFE, Yogyakarta.*Skripsi*
- Arikunto, Suharsimi. (2014). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Ariesta, F. (2013). Pengaruh Kualitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- Bastian, Indra. (2011). Akuntansi Sektor Publik. Edisi Ketiga . Jakarta: Erlangga
- Darmawan (2018). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Skripsi Universitas Islam Indoensia
- Fathoni, A. (2011). *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta:Rineka Cipta
- Ghozali, Imam. (2013). *Model Persamaan Struktural Konsep dan Aplikasi Dengan Program AMOS Versi 5.0*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, Damodar. (2010). *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Hendri, Meisy &Erinos. (2020). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada OPD Provinsi Sumatera Barat). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*. Vol. 2, No 1, Seri E, Februari 2020, Hal 2479-2493

- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo.(2013) *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM
- Mardiasmo. (2012). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset
- Malhotra, Naresh K.(2010). *Riset Pemasaran (Marketing Research)* (Edisi 4 Jilid 1).New Jersey,Indonesia: PT. Indeks
- Mahmudi, (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Maksyur, Noprial Valenra. (2015). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Intern, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Indragiri Hulu). *JOM. FEKON Vol. 2 No. 2 OKTOBER*
- Mardiasmo. (2012). *Perpajakan*. Edisi Revisi 2013. Yogyakarta : Andi.
- Morissan, (2012), *Metode Penelitian Survey*, PT. Kencana, Jakarta
- Moeheriono. (2012). “*Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*”. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Mustafa. (2011). *Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah*, (Doctoral dissertation, UNS).
- Nafarin, M. (2013). *Penganggaran Perusahaan*. Edisi Revisi. Salemba Empat. Jakarta.
- Nazir, Moh (2010), *Desain penelitian*, Cetakan ke dua, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Notoatmojo, Soekidjo. (2013). Pengembangan Sumber Daya Manusia. Bandung: Pustaka Setia
- Noerdiawan, Deddi. (2010). Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat
- Nurillah, A. S. (2014). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Sakd), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (studi emipiris pada SKPD kota depok).
- Nugraeni & Badiatara. (2015). Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas

Kinerja. Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis. Universitas Mercu Buana Yogyakarta

Rachmawati, Ike Kusdiyah. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.

Reyhan, M.Hafiz. (2017). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Skpd Propinsi Sumatera Utara). *Skripsi. Universitas Sumatera Utara*.

Ristianti. (2014). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*. Universitas Negeri Semarang. UNNES.

Robbins, Stephen P., (2016), *Perilaku Organisasi : Konsep, Kontroversi, Aplikasi, Jilid 1 dan 2* Dialihbahasakan Oleh Sugiono , Prenhallindo, Jakarta

Roshanti, A., Sujana, E., & Sinarwati, K. (2014). Pengaruh Kualitas SDM, Pemanfaatan TI, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha , Volume 2 No: 1.

Ruri, W. (2013). Pengaruh Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan keuangan Pemerintah daerah (studi kasus pada dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah kota bandung).

R. Terry, George dan Leslie, W. Rue, (2010), Dasar – Dasar Manajemen, Bumi Aksara, Jakarta

Sanjaya, Achdar. (2017). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada SKPD Kab. Soppeng), Jurnal Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Sasongko. (2015). Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi. Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Fungsi Pengawasan dan Kinerja Pemerintah Daerah (Survei pada Pemda Kota, Kabupaten dan Provinsi di Jawa Tengah). *Jurnal Akuntansi & Bisnis*, Vol 9 Nomor 1, februari 2009.

Sehfuddin. (2011), *Manajemen Keuangan Pemerintah*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Graha Ilmu. Yogyakarta

Sedarmayanti. (2012).*Good Governance, Kepemerintahan yang Baik, Bagian Kedua* Edisi Revisi, Bumi Aksara, Jakarta

Sekaran, Uma & Bougie, Roger. (2014). *Research Method For Business A Skill Building Approach (5th Edition)* United Kingdom : John Wiley & Sons Ltd.

- Simanjuntak. (2010). *Manajemen Dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: fakultas Ekonomi
- Susanto, azhar. (2014). *Sistem Informasi Akuntansi Konsep dan Pengembangan Berbasis Komputer*. Penerbit: Lingga Jaya, Bandung.
- Sugiyono, (2018), *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*, Alfabeta, Bandung.
- Sukarni. (2011). Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, pengelolaan Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Penerapan *Good Governance* (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Padang). *Jurnal Universitas Negeri Padang*. Padang.
- Sukmaningrum. (2012). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (studi empiris pada pemerintah kabupaten dan kota Semarang). *Skripsi*. Universitas Diponegoro Semarang
- Tussakdiyah, Nurhasanah. (2017). Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Kabupaten Ogan Ilir (Studi Kasus Pada Bpkad Kabupaten Ogan Ilir). *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Palembang
- Ubaidah, Tsaniya. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Good Governance terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sragen). *Skripsi*: Universitas Muhammadiyah Surakarta